

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap perusahaan bertanggung jawab untuk melaporkan aktivitas keuangannya untuk setiap periode berupa laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan penyajian yang terstruktur yang berasal dari bagian keuangan dan kinerja keuangan perusahaan. Laporan keuangan dikatakan baik apabila laporan keuangan mempunyai integritas dan tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas tinggi adalah laporan keuangan yang penyajiannya lengkap. Penyajian laporan keuangan yang lengkap akan melindungi hak para pemangku sebenarnya, sehingga tidak menemukan laporan keuangan yang dimanipulasi dan menyesatkan (Nurbaiti, 2020:2). Menurut Dewi (dalam Fikri dan Suryani, 2020:2) menyatakan bahwa integritas laporan keuangan mengacu pada fakta bahwa laporan keuangan secara wajar menyajikan dan menampilkan informasi yang wajar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Integritas laporan keuangan diproksi dengan konservatisme. Sikap konservatisme mengandung makna sikap berhati-hati dalam menghadapi resiko dengan cara bersedia mengorbankan sesuatu untuk mengurangi atau menghilangkan resiko. Menurut FASB Statement of Concept No.2, konservatisme akuntansi adalah reaksi hati-hati menghadapi ketidakpastian yang melekat dalam perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko intern dalam lingkungan bisnis sudah cukup dipertimbangkan. Ketidakpastian dan risiko tersebut harus dicerminkan dalam laporan keuangan agar nilai prediksi dan kenetralan bias diperbaiki. Pelaporan yang didasari kehati-hatian akan memberi manfaat yang terbaik untuk semua pemakai laporan keuangan.

Laporan keuangan dinyatakan berintegritas apabila dalam penyajiannya telah menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan yang benar serta terhindar oleh

perbuatan manajemen yang dengan sengaja melakukan manipulasi data keuangan (Ayem & Yuliana, 2019:2). Integritas laporan keuangan mengacu pada penyajian secara jujur dan pengungkapan data akuntansi dengan mencerminkan kegiatan ekonomi entitas yang sebenarnya (Istiantoro dkk, 2018:2). Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan yang disajikan dengan berintegritas merupakan bentuk akuntabilitas perusahaan kepada para pengguna laporan keuangan.

Informasi yang disampaikan didalam laporan keuangan haruslah memiliki integritas agar para pengguna laporan keuangan tidak keliru didalam menetapkan suatu keputusan. Menurut Dewi & Putra (2016:2) menyatakan bahwa ada dua hal yang mempengaruhi integritas informasi laporan keuangan yaitu relevansi dan reliabilitas. Informasi keuangan dapat dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan laporan keuangan dapat dikatakan reabilitas jika laporan tersebut dapat diandalkan didalam penggunaannya. Laporan keuangan yang diungkapkan oleh perusahaan haruslah mencerminkan kondisi yang sesungguhnya terjadi di perusahaan tersebut. Sehingga, apabila perusahaan telah mengungkapkan keseluruhan yang terjadi didalam perusahaan maka laporan keuangan tersebut memiliki integritas yang tinggi.

Akhmad Sayuti (2021), selaku Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengemukakan bahwa belum semua perusahaan mampu mewujudkan integritas laporan keuangan salah satunya PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis dua mantan direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, Joko Mogoginta dan Budhi Istanto dengan hukuman penjara masing-masing selama empat tahun dan denda masing-masing Rp 2 miliar subsidiar tiga bulan penjara. Keduanya dinyatakan bersalah lantaran telah melakukan manipulasi laporan keuangan 2017 dengan tujuan mengerek harga saham perseroan.

“Menyatakan Joko Mogoginta, dan Budhi Istanto secara sah dan meyakinkan memberikan pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di Bursa Efek Indonesia. Dalam pertimbangannya Majelis hakim menilai

Joko dan Budhi yang menandatangani laporan keuangan merupakan pihak yang bertanggungjawab atas tindakan manipulasi yang dilakukan pada laporan keuangan perseroan 2017.

Adapun manipulasinya berupa enam perusahaan distributor afiliasi yang ditulis merupakan pihak ketiga, dan adanya penggelembungan (*overstatement*) piutang dari enam perusahaan tersebut dengan nilai mencapai Rp 1,4 triliun. Hakim Akhmad juga menyebutkan adanya dugaan aliran dana dari perseroan senilai Rp 1,78 triliun kepada manajemen. “Adanya aliran dana Rp 1,78 triliun melalui beberapa skema seperti pencairan dana dari beberapa bank melalui deposito berjangka, transfer bank, dan uang lainnya. Hal ini tidak dilakukan pengungkapan yang memadai oleh perseroan sehingga melanggar aspek pengawasan pasar modal” sambung Hakim Akhmad.

Hakim Akhmad juga menilai pelanggaran pasal 93 UU 8/1995 tentang pasar modal merupakan tindakan pidana, sehingga ia menilai langkah OJK yang langsung melakukan penyidikan terhadap perkara ini merupakan langkah yang tepat. Hal ini sekaligus mematahkan *argument* pembelaan dari pembela hukum serta Chaerul Huda, saksi ahli terdakwa yang menilai kesalahan pencatatan afiliasi dan penggelembungan piutang harusnya diberi sanksi administratif. Lebih lanjut Anggota Majelis Hakim Arlandi Triyogo menjelaskan bahwa tindakan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan Joko dan Budhi memang memberikan kerugian kepada para pemegang saham Tiga Pilar dan melanggar aspek perlindungan terhadap investor pasar modal.

“Adanya enam distributor yang dicatat sebagai pihak ketiga memiliki konteks perlindungan investor. Terhadap perusahaan pihak ketiga artinya jika terjadi masalah yang akan bertanggungjawab adalah pihak ketiga. Sementara karena enam perusahaan distributor adalah afiliasi, jika terjadi masalah adalah perusahaan (Tiga Pilar), artinya ada konflik di internal” papar Arlandi. Dalam persidangan sebelumnya, salah satu pemegang saham minoritas dari enam perusahaan distributor tersebut yaitu Hendra Hadi Subrata mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya tindakan

penggelembungan piutang terhadap perusahaan-perusahaannya dalam laporan keuangan Tiga Pilar (Kontan.co.id).

Selain PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, adapula perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi yaitu PT Waskita Karya, Menurut Ali Fikri (2020), selaku pelaksanaan tugas juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar, mantan Kepala Departemen Keuangan dan Risiko II PT Waskita Karya, diduga memalsukan data keuangan terkait proyek subkontraktor fiktif. Hal itu diselidiki penyidik KPK yang sedang mengusut Yuly Ariandi sebagai tersangka kasus korupsi terkait pekerjaan subkontrak fiktif pada proyek yang dilakukan PT Waskita Karya.

Tersangka YAS (Yuly Ariandi Siregar) ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan berbagai data keuangan dalam proyek sub kontraktor. Selain itu, KPK sedang menyelidiki aliran uang yang diduga diterima oleh Yuly Ariandi dan empat tersangka lainnya dari serangkaian proyek subkontrak fiktif di Waskita Karya. Penyidik menyelidikinya dengan memeriksa Divisi II PT Waskita Karya, Wagimi dan staf keuangan.

Tim penyidik KPK juga memeriksa Mohammad Hosen, mantan Komisaris PT Aryana Sejahtera. Sebagai bagian dari penyelidikan ini, Hosen ditanyai tentang operasi dan kontrak fiktif antara PT Aryana dan PT Waskita Karya. PT Aryana Sejahtera diketahui menjadi salah satu dari empat perusahaan yang digunakan tersangka untuk menggarap 41 sub kontraktor fiktif di 14 proyek yang sedang dikerjakan Waskita Karya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Kepala Divisi Keuangan dan Risiko PT Waskita Karya II Yuly Ariandi Siregar dan mantan Kepala Divisi II Waskita Karya Pathor Rachman sebagai tersangka. Fathor, Yuly dan kawan-kawan diduga menyewa beberapa sub kontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada serangkaian proyek konstruksi yang dilakukan emiten berkode saham WSKT. Beberapa pekerjaan diyakini telah dilakukan oleh perusahaan lain, tetapi kesan yang

diberikan masih diberikan bahwa itu dilakukan oleh empat sub kontraktor yang diidentifikasi sejauh ini.

Empat perusahaan dilaporkan gagal melakukan pekerjaan yang dikontrak untuk mereka lakukan. Untuk sub kontraktor fiktif, PT Waskita Karya membayar subkontraktor tersebut. Namun, kemudian sub kontraktor mengembalikan pembayaran PT Waskita Karya ke sejumlah pihak, yang beberapa di antaranya kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor Racman dan Yuly Ariandi Siregar. Kerugian keuangan negara minimal Rp 186 miliar. Perhitungannya adalah jumlah total yang dibayarkan PT Waskita Karya kepada sub kontraktor.

KPK kembali menetapkan tiga tersangka baru. Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Dirut dan Dirut Jasa Marga Desi Arryani, Direktur PT Waskita Beton Precast Jarot Subana, dan Deputi Direktur Divisi II PT Waskita Karya Fakhri Usman. Desi Arryani ditetapkan sebagai tersangka karena jabatannya sebagai mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya. Sedangkan Jarot Subana ditetapkan sebagai tersangka oleh mantan Kepala Seksi Pengawasan Divisi III/Sipil/II PT Wasita Karya. Sementara itu, Fakhri Usman, mantan Kepala Bagian Proyek dan Direktur Tata Usaha Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya, ditetapkan sebagai tersangka. (Bisnis.com).

Manipulasi laporan keuangan merupakan salah satu tindakan pidana yang dapat merugikan orang banyak selain itu juga akan mencoreng nama baik perusahaan dalam manipulasi suatu laporan keuangan pasti akan melibatkan seorang akuntan publik. Pengauditan yang dilakukan oleh akuntan publik diharapkan dapat menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan bukan malah membantu perusahaan untuk melakukan kecurangan didalam perusahaan. Karena belum diterapkannya tata kelola perusahaan baik dapat mendorong perusahaan untuk melakukan manipulasi akuntansi secara berkala untuk menghindari turunnya kredibilitas perusahaan di mata publik. Oleh sebab itu, diharapkan perusahaan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai landasan operasional agar kredibilitas perusahaan

dapat tercapai tanpa dilakukan manipulasi akuntansi, sehingga laporan keuangan yang diberikan kepada para stakeholder akan memiliki integritas yang diharapkan.

Mekanisme *Corporate Governance* merupakan suatu ukuran, prosedur, dan hubungan antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut. Pada penelitian ini, mekanisme *Corporate Governance* diukur menggunakan kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah aspek yang menunjukkan pengaruh keberadaan pemegang saham terhadap kinerja manajemen, terkait dengan pelaporan keuangan perusahaan tersebut. Kepemilikan institusional dianggap dapat melakukan fungsi monitoring yang efektif dan dapat meminimalisir kecurangan manajemen dalam penyampaian dan penyajian laporan keuangan. Menurut penelitian Dewi & Putra (2016:2), kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Kepemilikan institusional memiliki sumber daya dan profesionalisme yang lebih tinggi untuk mengawasi penggunaan aktiva perusahaan dan dapat menguji keandalan dalam menganalisa informasi.

Selanjutnya unsur lain yang diperlukan adalah komisaris independen juga memiliki peran pengawasan yang penting dalam *Corporate Governance* sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas. Komisaris independen yang efektif dapat melaksanakan fungsi pengawasan serta untuk menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Nurdiah dan Pradika (2017:3) mengatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Atiningsih dan Suparwati (2018:2) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Selain dari pihak perusahaan, ada faktor lain dari pihak eksternalnya yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan adalah kualitas audit. Peran auditor juga sangat penting untuk mendapatkan hasil audit yang berkualitas. Posisi auditor

sebagai pihak independen untuk memberikan pendapat yang handal bagi pemerintah, investor, kreditor, pemegang saham, karyawan, debitur, masyarakat umum, dan pemangku kepentingan lainnya. Penting bagi pemakai laporan keuangan untuk memandang Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pihak yang independen dan kompeten, hal ini karena akan mempengaruhi berharga atau tidaknya suatu laporan keuangan tersebut.

Kualitas audit ini dapat dicapai jika standar auditnya yang berlaku umum dapat dipenuhi. Standar audit adalah pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan. Dengan itu, maka nilai audit atau kualitas audit juga meningkat. Peneliti sebelumnya yang membahas mengenai pengaruh kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan dikemukakan oleh Mudasetia & Solikhah (2017:7), Qonitin & Yudowati (2018:7), Hartono & Wenny (2017), dan nurjannah & Pratomo (2014:7) yang hasilnya menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Selain kualitas audit faktor lainnya adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan diakui sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi manajemen perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan. Perusahaan dengan skala besar akan menghadapi tuntutan yang besar pula dari pemangku kepentingannya untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya Nurdiah & Pradika (2017:3). Dalam penelitian yang dilakukan Febriyantri (2020:3) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Namun, berbeda dari hasil penelitian Parinduri dkk, (2018:3) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti ingin menguji kembali mengenai faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya di atas yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan sebagai pokok pembahasan di dalam penelitian ini yang berjudul **“Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, Kualitas Audit Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan (Studi pada Perusahaan Sub Sektor Kontruksi dan Bangunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan ?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan ?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan ?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan ?
5. Apakah kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis kepemilikan institusional berpengaruh atau tidak terhadap integritas laporan keuangan.
2. Menganalisis komisaris independen berpengaruh atau tidak terhadap integritas laporan keuangan.
3. Menganalisis kualitas audit berpengaruh atau tidak terhadap integritas laporan keuangan.

4. Menganalisis ukuran perusahaan berpengaruh atau tidak terhadap integritas laporan keuangan.
5. Menganalisis kepemilikan institusional, komisaris independen, kaulitas audit dan ukuran perusahaan berpengaruh atau tidak terhadap integritas laporan keuangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak pihak, antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Peneliti mendapatkan kesempatan dan pengalaman yang berharga dimana peneliti dapat menambah ilmu pengetahuan tentang integritas laporan keuangan dan dapat memberi informasi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan khususnya pada perusahaan sub sektor kontruksi dan bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Bagi Para Pengguna Laporan Keuangan

Sebagai sarana informasi yang bisa membuat gambaran untuk para pengguna laporan keuangan mengenai faktor-faktor yang terkait dengan integritas suatu laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu perusahaan tersebut.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Menambah literatur, pengembangan ilmu akuntansi dan sebagai acuan penelitian pada bidang akuntansi, terutama untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai integritas laporan keuangan.

4. Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan perusahaan untuk lebih memperhatikan jalannya mekanisme *corporate governance* dalam operasional perusahaan guna meningkatkan integritas laporan keuangan.

5. Bagi Auditor

Diharapkan menjadi teguran bagi auditor agar lebih meningkatkan kualitas auditnya, dan mampu menerapkan independensi yang seharusnya itu sudah tertanam di dalam diri auditor.